

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2018 dapat diselesaikan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta menyusun Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2018 dan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

Di era saat ini perwujudan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu kebutuhan yang tidak terhindarkan. Dalam kondisi sosial masyarakat yang sangat dinamis, sikap yang harus tetap dikembangkan adalah menjaga kepercayaan publik melalui kinerja yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel untuk memberikan public good services serta pencapaian kinerja yang ditargetkan. LKIP Tahun 2018 ini merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja (performing goverment) sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Akhirnya laporan evaluasi kinerja ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian kami menyadari bahwa masih dijumpai tantangan dan masalah dalam pencapaian target kinerja, namun demikian optimisme yang tinggi senantiasa tetap dimiliki untuk lebih meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Yogyakarta

TTD H. Sisruwadi, SH., M.Kn.

DAFTAR ISI

KATA PE	ENGANTAR	i
DAFTAR	: ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	1
	1.3 Maksud dan Tujuan	2
	1.4 Gambaran Umum Organisasi	2
	1.5 Susunan Organisasidan Keadaan Personil	3
	1.6 LingkunganStrategis yang Berpengaruh	4
	1.7 Sarana dan Prasarana	7
	1.8 Anggaran	10
	1.9 Sistematika Penulisan	17
BAB II	PERENCANAAN STRATEGI DAN RENCANA KERJA	19
	2.1 RencanaStrategik	19
	2.2 RencanaKinerja	22
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	25
	3.1 Capaian Kinerja Organisasi	25
	3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama dan Sasaran	27
	3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	28
	3.4 Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah	36
	3.5 Realisasi Anggaran	38
BAB IV	PENUTUP	47
LAMPIR	AN-LAMPIRAN	49

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangandan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih danbertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tahun 2018 ini merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara administrasi kependudukandi Kota Yogyakarta serta kewenangan dalam pengelolaan sumber daya berdasarkan perencanaan strategisyang telah ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta merupakan hasil perumusandari rangkaian proses sistematis dan berkelanjutan yang terkait dengan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah dengan mempertimbangkan kemampuansumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi. Program dan Kegiatan, rencana pembangunan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Yogyakarta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkedudukan sebagai unsur pelaksanaPemerintah Daerah dibidangKependudukan dan Pencatatan Sipildengan tugasmelaksanakan urusanPemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2018 dilandasi dasar hukum, sebagaiberikut :

- a. UU No. 28 Tahun 1998 tentang Penyeleggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- d. Undang- undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- g. Peratutan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- k. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- I. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- n. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- o. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018 adalah :

- a. Memberikan gambaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja instansi sehingga diketahui tingkatkeberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya
- b. Sebagai parameter penilaian kinerja Perangkat Daerah
- c. Memberikan feedback terhadap upayapeningkatan kinerja tahun berikutnya
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaran pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan
- e. Sebagai media koreksi, perbaikan dan pengembangan Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah pada periode kerja selanjutnya
- f. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya

1.4 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun fungsi dan ketugasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

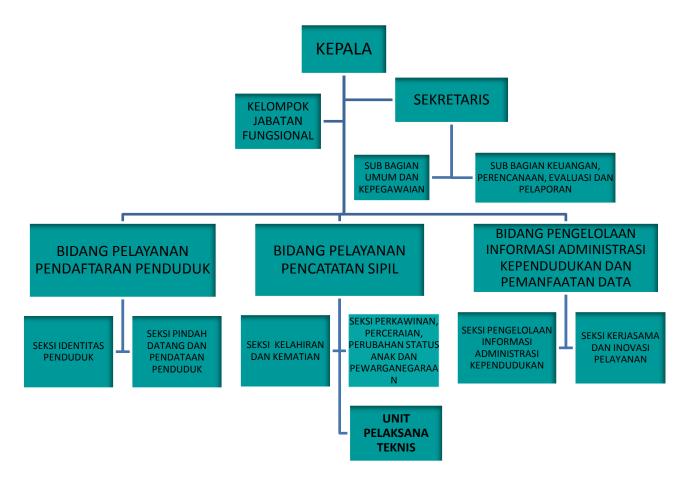
a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

- b. Adapun fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta adalah:
 - Perumusan kebijakan teknis urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
 - Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil,
 - Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil,
 - Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.5 SUSUNAN ORGANISASI DAN KEADAAN PERSONIL

Berdasarkan susunan organisasinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dikepalai oleh seorang Kepala Dinas dibantu Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang. Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Kasubbag. Sedangkan masing-masing Kepala bidang dibantu oleh 2 (dua) Kepala Seksi dan beberapa staf yang melaksanakan pelayanan publik di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENACATATAN SIPIL
KOTA YOGYAKARTA



1.6 LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

1.6.1 Kondisi Geografis Kota Yogyakarta

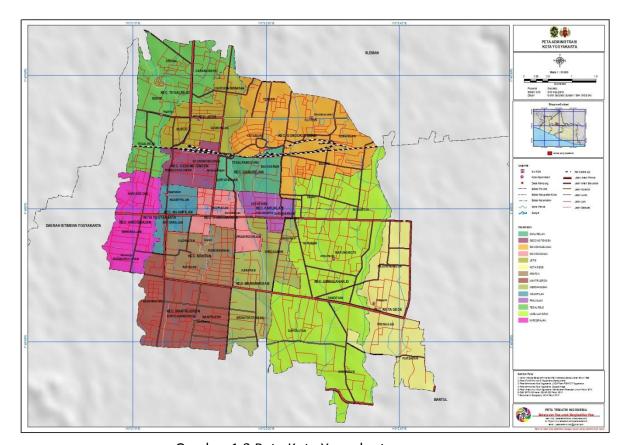




Gambar 1.2 Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan berkualitas, pariwisata berbasis budaya dan pusat pelayanan jasa yang berwawasan lingkungan merupakan kota yang "terbuka". Banyak penduduk datang ke Kota Yogyakarta baik sebagai penduduk tetap atau tinggal sementara. Kondisi mobilitas penduduk yang tinggi tersebut menjadikan masalah tertib administrasi kependudukan menjadi ketentuan yang penting untuk ditegakkan.

Kompleksitas masalah administrasi kependudukan diantaranya dipengaruhi oleh kondisi wilayah. Luas wilayah Kota Yogyakarta adalah 32,5 km² terdiri dari 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan, meliputi 616 RW dan 2.534 RT.



Gambar 1.3 Peta Kota Yogyakarta

Jumlah penduduk Kota Yogykarta s.d.Bulan Desember 2018 adalah 412.726jiwa.

Pada realitanya, jumlah penduduk yang berada di Kota Yogyakarta khususnya pada siang hari jauh di atasnya. Hal ini dikarenakan banyak dari mereka menuntut ilmu, bekerja, pemeriksaan kesehatan, pertemuan/ meeting dan aktivitas lainnya diwilayah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kewenangan Pemerintah Kota dalam urusan pemerintahan daerah salah satu urusan wajibnya adalah di bidang kependudukan dan catatan sipil.

Berdasarkan Peraturan Permerintah RI No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, dan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 59 tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, sertaBidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data.

1.6.2 Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinyaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta memiliki sumberdaya manusia dalam jumlah dan kapasitas yang memadai.



Pada tahun 2018 terdapat 44 orang pegawai terdiri atas PNS sebanyak 38 orang dan Tenaga Bantuan (Naban) sebanyak 6 orang. Sedangkan bila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya sebagian besar merupakan pegawai laki-laki yaitu sebanyak 68,18% dan sisanya sebanyak 31,82% merupakan pegawai perempuan. Pegawai Laki laki 30 orang, dan wanita sebanyak 14 orang.

Diagram 1.1. Komposisi Pegawaiberdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018

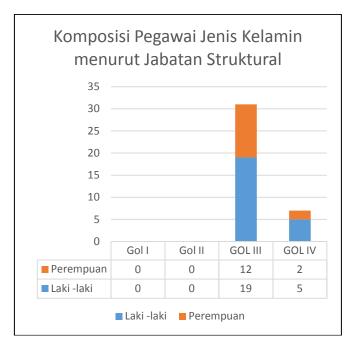
Dari seluruh jumlah pegawai tersebut sebanyak 12 orang pejabat struktural dan 30 orang staf fungsional umum, dan 2 orang fungsional tertentu dengan komposisi 27,27% pejabat struktural dan 72,73% non struktural.

Tabel 1.1Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural Tahun 2018

No	Jabatan						
1	Kepala	1 orang					
2	Sekretaris	1 orang					
3	Kepala Bidang	3 orang					
	 Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data 						

4	Kepala Sub Bagian	2 orang				
	 Kepala Sub Bag. Umum dan Kepegawaian 					
	• Kepala Sub Bag. Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan					
	Pelaporan					
5	Kepala Seksi	5 orang				
	Kepala Seksi Identitas penduduk					
	 Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk 					
	Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian					
	Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Statsu Anak					
	dan Pewarganegaraan					
	• Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi					
	Kependudukan					
	Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan					
6	Staf Fungsional Umum					
7	Staf Fungsional Tertentu	2 orang				
8	Tenaga Bantuan (Naban)	6 orang				

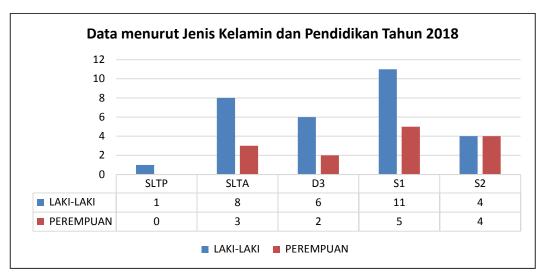
Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian, 2018



Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Jenis Kelaminmenurut Jabatan Struktural Tahun 2018

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa pegawai laki-laki lebih banyak menduduki jabatan struktural dibanding perempuan. Selain itu pada tingkat eselon yang semakin tinggi menunjukkan bahwa komposisi perempuan yang menduduki jabatan semakin mengecil. Beberapa upaya perlu dilakukan untuk mendorong pengembangan karir perempuan sehingga semakin terbuka kesempatan bagi perempuan untuk menduduki posisi strategis untuk berperan lebih luas dalam pengambilan kebijakan

Bila pegawai dipilah menurut pendidikan dan jenis kelamin menunjukkan bahwa pendidikan SLTP sampai dengan pendidikan tinggi S1 masih didominasi oleh laki-laki, sedangkan pada tingkat pendidikan tinggi S2 jumlah antara laki-laki dan perempuan relatif seimbang.



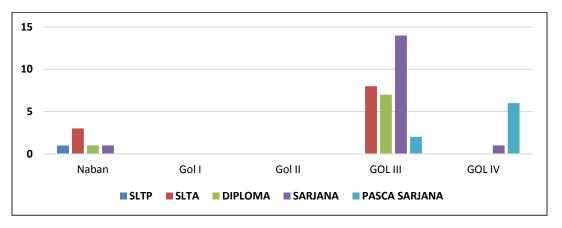
Grafik 1.3. Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

Sedangkan apabila data dipilah menurut pendidikan pada tiap golongan menunjukkan bahwa PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagian terbesar adalah adalah golongan III dengan pendidikan S1 sebanyak 45,16% Rincian detail pegawai menurut pendidikan dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2Daftar Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan GolonganPer 31 Desember 2018

PENDIDIKAN	Naban	Gol I	Gol II	GOL III	GOL IV	Jumlah
SLTP	1	0	0	0	0	1
SLTA	3	0	0	8	0	11
DIPLOMA	1	0	0	7	0	8
SARJANA	1	0	0	14	1	16
PASCA SARJANA	0	0	0	2	6	8
Jumlah	6	0	0	31	7	44

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian, 2018



Grafik 1.4 Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan dan Golongan

1.7 SARANA DAN PRASARANA

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta memiliki beberapa sarana dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel1.3Daftar Jenis Barang dan KondisinyaPer 31 Desember 2018

	Ionia Bours	Ко	ndisi	Jumlah	
	Jenis Barang	Baik	Rusak	Jumian	
1	Genset	16	-	16	
2	Pompa Air	2	-	2	
3	Mobil	4	-	4	
4	Sepeda Motor	18	-	18	
5	Sepeda	1	-	1	
6	Mesin Ketik	10	-	10	
7	Almari Besi	2	-	2	
8	Rak Besi Siku	46	-	46	
9	Rool Pack/ Rotary filling	4	-	4	
10	Rak Kayu	25	-	25	
11	Filling Cabinet	35	-	35	
12	Brankas	3	-	3	
13	Almari lereg kaca	16	-	16	
14	Almari kayu	20	-	20	
15	Whiteboard	1	-	1	
16	Mesin Presensi	3	-	3	
17	Layar OHP	1	-	1	
18	LCD Proyektor	3	-	3	
19	Meja rapat	2	-	2	
20	Kursi Komputer	10	-	10	
21	Kursi Tunggu	16	-	16	
22	Meja Komputer	7	-	7	
23	Kursi Tamu	4	-	4	
24	Meja Kerja	46	-	46	
25	Meja Knap	17	-	17	
26	Jam Dinding	8	-	8	
27	Vacum Cleaner	3	-	3	
28	Air Purifier	1	-	1	
29	AC	15	-	15	
30	Exhouse Fan	2	-	2	
31	Televisi	4	-	4	
32	Sound System	3	-	3	
33	UPS PC	32	-	32	
34	Lambang Garuda	1	-	1	
35	Gambar Presiden, Wakil Presiden	2	-	2	
36	Tiang Bendera	1	-	1	
37	Dispenser	3	-	3	
38	Monitor PC	21	-	21	
39	PC	45	-	45	
40	Laptop	11	-	11	
41	Scanner	17	-	17	
42	Server SIAK	1	-	1	
43	Sarana LAN	1	-	1	
44	Sarana LAN dengan modem	14	-	14	

45	Printer	133	-	133
46	Meja Kerja 1 Biro	6	-	6
47	Kursi Sandaran Tinggi	3	-	3
48	Kursi Sandaran Rendah	7	-	7
49	Kursi rapat lipat	119	-	119
50	Kursi rapat susun	5	-	5
51	Kursi staf	43	-	43
52	Camera Digital	33	-	33
53	Adaptor Camera	15	-	15
54	Tripod	14	-	14
55	Pemotong KTP ELEKTRONIK	28	-	28
56	Mesin Laminating	36	-	36
57	Lamipacker	14	-	14
58	Pesawat Telepon	10	-	10
59	Kipas Angin	8	-	8
60	Vertical Blind	1	-	1
61	Karpet	1	-	1
62	Bangunan Gedung	1	-	1
63	Buku Perpustakaan	37	-	37
64	Kursi Roda	1	-	1

Sumber: Buku Inventaris Barang, 2018

Dari sarana prasarana yang ada sebagian besar dalam kondisi yang baik dan digunakan untuk:

- 1. Pendukung operasional administrasi perkantoran SKPD
- 2. Pendukung operasional layanan publik penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain :
 - Counter Layanan
 - Nomor Antrian Elektronik
 - Ruang Laktasi
 - Kids Zone (Layanan Ramah Anak)
 - Jalur Difabel
 - Toilet bagi pengunjung biasa dan difabel
 - Signed informasi publik (visi, misi, maklumat layanan, jam layanan, informasi pengaduan dan lain-lain)
 - Meja informasi
 - Kotak Aduan
 - Kotak Penilaian Layanan
 - Mobil Keliling













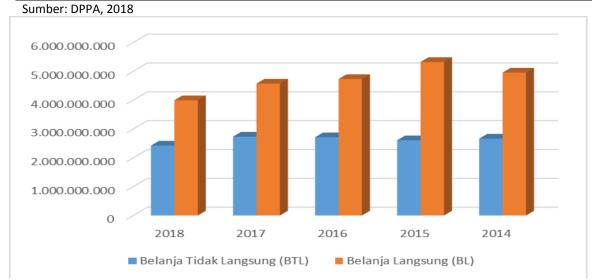
Gambar 1.4 Sarana Prasarana Pelayanan

1.8 ANGGARAN

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2018 Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Yogyakarta didukung Anggaran Belanja Daerah. Total Anggaran Belanja Daerah tahun 2018 sebesar Rp.6.419.837.406,- dengan perbandingan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung 62,25 % dibanding 37,75 %

Tabel 1.4 Jumlah Alokasi Anggaran Belanja

Jenis Belanja	Anggaran Tahun 2018 (Rp)	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Anggaran Tahun 2016 (Rp)	Anggaran Tahun 2015 (Rp)	Anggaran Tahun 2014 (Rp)
Belanja Tidak Langsung (BTL) Belanja	2,423.245.356	2,734.348.514	2.711.552.693	2.608.300.570	2.664.258.312
Langsung (BL)	3.996.592.050	4,572.677.971	4.732.011.520	5.322.016.730	4.955.034.150
JUMLAH TOTAL	6.419.837.406	7,307.026.485	7.443.564.213	7.930.317.300	7.619.292.461



Grafik 1.5. Jumlah Alokasi Anggaran Belanja Th. 2014 - 2018

1.8.1. Belanja Tidak Langsung

Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 besaran anggaran belanja tidak langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil cenderung fluktuatif mengikuti kebutuhan Perangkat Daerah dan peraturan serta kebijakan yang berlaku di Pemerintah Kota Yogyakarta. Rincian alokasi penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

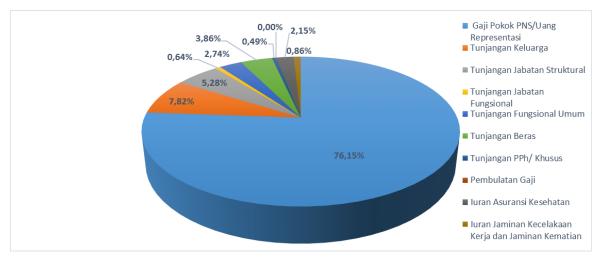
Tabel 1.5Anggaran Belanja Tidak langsungTh. 2014-2018

No	Rincian	Anggaran					
INO	Milician	2018	2017	2016	2015	2014	
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.845.394.090	2.094.072.540	2.094.072.540	1.994.936.230	2.044.042.117	
2	Tunjangan Keluarga	189.575.573	194.851.874	194.851.874	196.614.069	186.972.446	
3	Tunjangan Jabatan Struktural	128.045.750	151.438.625	151.438.625	155.169.625	155.169.625	
4	Tunjangan Jabatan Fungsional	15.498.000	22.500.000				
5	Tunjangan Fungsional Umum	66.368.750	71.355.375	71.355.375	78.807.125	92.361.750	

6	Tunjangan Beras	93.530.430	111.345.750	111.345.750	128.215.421	138.056.400
7	Tunjangan PPh/ Khusus	11.957.940	19.816.790	29.213.270	54.517.438	47.615.528
8	Pembulatan Gaji	25.901	31.756	31.756	40.662	40.446
9	luran Asuransi Kesehatan	52.060.352	59.243.245			
10	luran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	20.788.570	9.692.559			
	Jumlah	4.423.245.356	2.734.348.514	2.711.552.693	2.608.300.507	2.664.258.312

Sumber: DPPA, 2018

Distribusi persentase terbesar alokasi anggaran belanja tidak langsung adalah untuk membayar gaji pegawai seperti digambarkan dalam grafik sebagai berikut ini:



Grafik 1.6 Komposisi Anggaran Belanja Tidak Langsung 2018

1.8.2.Belanja Langsung

Komposisi Anggaran Belanja Langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKota Yogyakarta sejak tahun 2014 sampai tahun 2018fluktuatifseperti dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.5 Anggaran Belanja langsung Th. 2014-2018

No	Program / Kegiatan	Anggaran					
140	Program / Registan	2018	2017	2016	2015	2014	
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	806.809.272	692.619.201	698.867.780	788.266.000	724.849.655	
1.1.	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	3.250.000	2.406.000	2.405.000	
1.2.	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	0	0	7.800.000	7.200.000	7.200.000	

1.3.	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional.	0	0	4.500.000	4.500.000	4.365.000
1.4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0	0	46.800.000	48.300.000	36.225.000
1.5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0	0	6.130.000	15.350.000	6.350.000
1.6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0	0	83.800.000	80.950.000	54.400.000
1.7.	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	0	0	44.258.300	42.774.350	40.361.600
1.8.	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	0	0	21.125.000	20.900.000	21.375.000
1.9.	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	10.150.000	9.260.000	6.507.000
1.10	Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	0	0	57.570.000	32.430.500	25.215.200
1.11	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	12.536.000	15.182.000	10.152.000
1.12	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan	0	0	3.000.000	3.000.000	2.900.000
1.13	Kegiatan Penyediaan Makanan Minuman	0	0	48.495.000	37.946.000	31.728.000
1.14	Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	0	0	223.750.000	303.350.000	190.800.000
1.15	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	0	0	125.703.480	102.101.520	72.432.000
1.16	Kegiatan Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan konsultasi	226.479.000	155.090.000	0	0	0
1.17	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	432.405.312	351.654.721	0	0	0
1.18	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	147.924.960	185.874.480	0	0	0

2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	163.482.000	227.685.000	365.623.000	365.656.000	363.216.000
2.1.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor/Tempat	5.520.000	100.325.000	216.527.000	258.018.000	255.578.000
2.2.	Kegiatan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	157.962.000	127.360.000	149.096.000	107.638.000	107.638.000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		•	0		
3.1	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan		-	0		
.	Duranes / Wardahan			Anggaran		
No	Program / Kegiatan	2018	2017	2016	2015	2014
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	36.000.000	0	37.200.000	0	0
4.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	36.000.000	0	37.200.000	0	0
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	32.535.000	90.198.000	78.075.000	71.684.000	55.660.000
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kierja SKPD.	0	0	76.522.00	78.057.000	71.684.000
3.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	32.535.000	90.198.000	0	0	0
4	Program Pelayanan Dokumen dan Surat- surat Kependudukan	0	0	1.275.495.790	1.173.552.520	1.159.088.000
4.1.	Pembuatan KTP ELEKTRONIK/KIA dan KK Di Kota Yogyakarta	0	0	608.500.790	628.556.520	422.787.000
4.2.	Peningkatan Administrasi Kependudukan	0	0	666.995.000	544.996.000	736.301.000
	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	706.912.648	1.393.899.570	0	0	0
	Pelayanan Identitas Penduduk	458.362.236	783.901.990	0	0	0

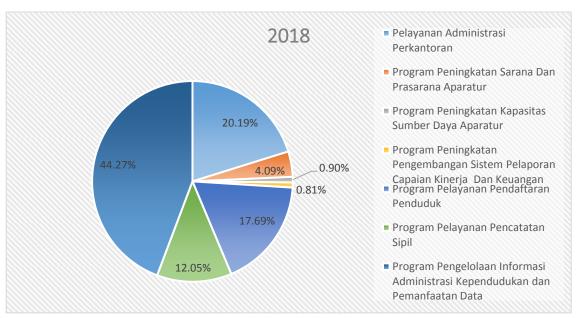
	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	248.550.412	609.997.580	0	0	0				
5	Program Pelayanan Permohonan dokumen Pencatatan Sipil	0	0	936.398.950	1.075.294.680	1.079.959.450				
5.1	Pengelolaan Dokumen Catatan Sipil	0	0	412.631.590	582.651.000	550.514.750				
5.2	Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil	0	0	523.767.360	492.643.680	529.444.700				
	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	481.640.780	891.166.310	0	0	0				
	Pelayanan Kelahiran dan Kematian	427.259.324	519.752.150	0	0	0				
	Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	54.381.456	371.414.160	0	0	0				
No	Program / Kegiatan	Anggaran								
	,	2018	2017	2016	2015	2014				
6	Program Implementasi SIAK	0	0	1.341.904.000	1.830.998.160	1.768.670.900				
6.1.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	0	0	752.000.000	1.323.624.000	1.227604.000				
6.1.	Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi	0	0	752.000.000 589.904.000	1.323.624.000 507.374.160	1.227604.000 541.066.900				
	Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi									
	Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan	0	0	589.904.000	507.374.160	541.066.900				
	Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kerjasama dan Inovasi	1.769.212.350	1.227.109.890	589.904.000	507.374.160	541.066.900				

Sumber: DPPA, 2018

Berikut grafik untuk belanja langsung tahuj 2014-2018 dan Komposisi Anggaran Belanja Langsung Th 2018.



Grafik 1.7 Anggaran Belanja Langsung Th 2014 – 2018



Grafik 1.8 Komposisi Anggaran Belanja Langsung Th 2018

1.8.3. Pendapatan

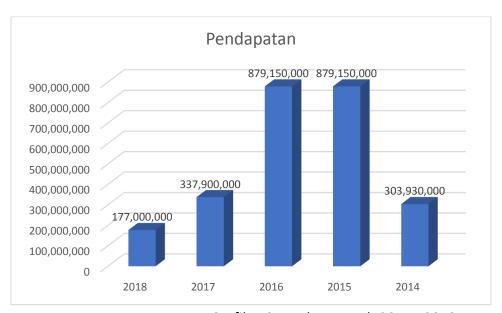
Dengan berlakunya UU No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, semua produk layanan administrasi Kependudukan tidak dikenakan biaya. Adapun sangsi administrasi berupa denda bagi masyarakat yang terlambat melakukan pelaporan kependudukannya masih sesuai ketentuan Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dihapuskan mulai bulan Juni 2018;

Adapun target pendapatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2018 adalah sebesar Rp177.000.000,- dengan rinciannya dapat dilihat dalam Tabel1.7 sebagai berikut:

Tabel 1.7 Target Pendapatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKota Yogyakarta Tahun 2014 - 2018

No	Uraian		Pe	ndapatan (F	Rp)	
		2018	2017	2016	2015	2014
1	Pendapatan Retribusi Daerah (KK/KTP EL dan KIA)	0	0	0	0	242.180.000
2	Pendapatan Retribusi Daerah (Akta Catatan Sipil)	0	0	0	0	61.750.000
3	Lain- lain Pendapatan yang sah	177.000.000	337.900.000	879.150.000	879.150.000	0
	JUMLAH	177.000.000	337.900.000	879.150.000	879.150.000	303.930.000

Sumber: DPPA, 2018



Grafik 1.9 Pendapatan Th 2014 - 2018

1.9 SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja ini merupakan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta selama Tahun 2018 yang dibandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2018 sehingga tercermin tingkat keberhasilan organisasi tahun 2018.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Gambaran Umum Organisasi
- 1.5. Susunan Organisasi dan Keadaan Personil
- 1.6. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh
- 1.7. Sarana dan Prasarana
- 1.8. Anggaran
- 1.9. Sistematika Penulisan

BAB II RENCANA STRATEJIK DAN RENCANA KINERJA

- 2.1. Rencana Strategik
 - 2.1.1. Visi
 - 2.1.2. Misi
 - 2.1.3. Tujuan
 - 2.1.4. Sasaran
 - 2.1.5. Strategi Pencapaian
 - 2.1.6. Kebijakan
- 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2018

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

- 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja
- 3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Utama
- 3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- 3.4. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah
- 3.5. Realisasi Anggaran Belanja Daerah dan Pendapatan

BAB IV PENUTUP LAMPIRAN

BAB 2

RENCANA STRATEGIK DAN RENCANA KERJA

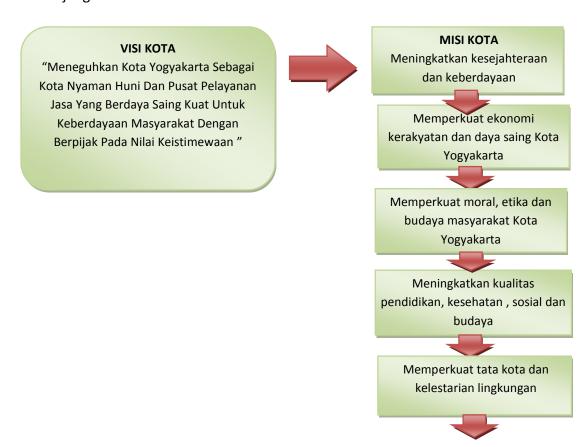
2.1 RENCANA STRATEGIK

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis. Dengan demikian Renstra merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan faktor-faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor-faktor eksternal yang berupa peluang dan tantangan. Guna mencapai tujuan organisasi dokumen renstra memuat visi , misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program serta kegiatan yang realistis dan terukur sebagai pedoman segenap anggota organisasi dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan.

Dokumen perencanaan stratejik tingkat Perangkat Daerah berupa dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan stratejik tingkat kota berupa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.

2.1.1 VISI

Visi berkaitan pandangan ke depan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Secara teknis visi merupakan rumusan umum untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu.





Berpedoman pada visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022 tersebut diatas maka sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Walikota Yogyakarta dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2017 – 2022, dengan strategi yang akan dilaksanakan yaitu:

- Menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mendorong terakomodirnya hak-hak penduduk serta perlindungan sosial dalam bentuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- 2. Menciptakan sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan yang melibatkan peran aktif masyarakat dan stakeholder lainnya baik secara langsung maupun tidak demi terwujudnya tertib adminduk bagi penduduk Kota Yogyakarta.
- 3. Menciptakan komitmen berbagai pihak melalui Perjanjian Kerjasama Pelayanan Terpadu, Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Data Kependudukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan kualitas data kependudukan.
- 4. Menciptakan berbagai inovasi sebagai terobosan dalam mengatasi permasalahan penyelenggaraan administrasi kepndudukan.

2.1.2 TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi daripernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5(lima) tahun. Mengacu kepada visi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendakdicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahunDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 adalah:

"Meningkatkan tertib administrasi kependudukan bagi masyarakat "

Dalam pencapaian tujuan dengan menetapkan indikator tujuan sebagaimana termuat dalam matriks berikut.

Tabel 2.1Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Formula Indikator	Target Tujuan	
			Awal	Akhir
Meningkatkan tertib	Indeks tertib	50% penerbitan	89,75%	99,25%
administrasi	administrasi	dokumen		
kependudukan bagi	kependudukan	kependudukan +		
masyarakat		50% penerbitan		
		dokumen		
		pencatatan sipil		

Sumber: Review RENSTRA Dindukcapil, 2018

2.1.3 SASARAN

Setelah ditetapkan tujuan, selanjutnya ditentukan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Sasaran dirumuskan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sasaran merupakan (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017–2022,maka ditetapkan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022 yaitu:

Guna mengukur keberhasilan pencapaian sasaran, maka masing-masing sasaran memiliki indikator kinerja sasaran sebagaimana termuat dalam matrik berikut.

Tabel 2.2 Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2017-2022

SASARAN	INDIKATOR	FORMULA			TARGET S	ASARAN		
	SASARAN	INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		SASARAN						
Tertib	Indeks tertib	50%	93,52%	96,75%	97,38%	98,00%	98,63%	99,25%
administrasi	administrasi	penerbitan						
kependudukan	kependudukan	dokumen						
masyarakat		kependudukan						
meningkat		+ 50%						
		penerbitan						
		dokumen						
		pencatatan						
		sipil						

Sumber: Review RENSTRA Dindukcapil, 2018

2.1.4 STRATEGI

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran, Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tahun 2018 yaitu :

- a. Mendorong terwujudnya tertib administrasi kependudukan melalui Gerakan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan)
- b. Melaksanakan Kerjasama Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan Stakeholder Terkait.
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi administrasi kependudukan berbasis internet

[&]quot; Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat "

- d. Melaksanakan percepatan pelayanan dengan pendekatan pelayanan
- e. Melaksanakan peningkatan kualitas data kependudukan dengan kerjasama integrasi data dengan stakeholder terkait.
- f. Menyelenggarakan forum koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se Daerah Istimewah Yogyakarta dalam rangka pemecahan masalah yang berhubungan dengan pelayanan administrasi kependudukan.
- g. Pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK untuk mendukung program Jogja Smart City
- h. Meningkatkan pengelolaan pengaduan dan keterbukaan informasi sesuai ketentuan

2.1.5 KEBIJAKAN

- 1. Melaksanakan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan) dengan menggerakan para kader tertib adminduk berbasis kampung
- 2. Melaksanakan pelayanan paket terpadu 3 in 1 antara dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Akta Kelahiran, KK dan KIA)
- 3. Melaksanakan pelayanan administrasi administrasi kependudukan secara on line
- 4. Melaksanakan percepatan pelayanan dengan jemput bola, pelayanan keliling baik dari rumah ke rumah, tempat publik, sekolah, kelurahan, lembaga pemasyarakat dan panti
- 5. Melaksanakan perjanjian kerjasama dibidang pelayanan kependudukan dengan beberapa Rumah Sakit Negeri maupun swasta.
- 6. Melaksanakan koneksitifitas data by system atas perubahan biodata hasil pencatatan perkawinan di KUA dan hasil Putusan Pengadinan Negeri ke dalam database kependudukan.
- Pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK untuk mendukung program Jogja Smart City
- 8. Pengomtimalkan pemanfaatan media sosial dan website untuk transparansi informasi kependudukan

2.2 RENCANA KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis danakan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai program dan kegiatan tahunan. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/ Kota dirumuskan indikator kinerja penyelenggaraan administrasi kependudukan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui indikator kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka dirumuskan target indikator kinerja sasaran sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Indeks terib administrasi kependudukan	96,75%

Sumber: Review RENSTRA Dindukcapil, 2018

Selanjutnya sebagai wujud pernyataan komitmen atau tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, maka sesuai amanah Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja rencana kinerja tahunan, maka Rencana Kinerja Tahunan ditetapkan sebagai Penetapan Kinerja Tahunan dengan rumusan program kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun penetapan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Penetapan Kinerja Tahunan Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tertib	Indeks tertib	96,75%	Program Pelayanan	Persentase	(Jumlah	99.75%	706.912.648
	administrasi	administrasi		Pendaftaran	penduduk	penduduk yang		
	kependudukan	kependudukan		penduduk	yang	memiliki KTP		458.362.236
	masyarakat			1. Kegiatan Pelayanan	memiliki	dibagi jumlah		
	meningkat			Identitas Penduduk	dokumen	penduduk wajib		
				2. Kegiatan Pelayanan	kependuduk	KTP) x 100% + (248.550.412
				Pindah Datang dan	an	Jumlah KK yang diterbitkan dibagi		
				Pendataan		jumlah KK) x		
				Penduduk		100% dibagi 2		
						indikator		
				Program Pelayanan	Persentase	(jumlah kutipan	93.75%	461.540.780
				Pencatatan Sipil	penerbitan	akta kelahiran		
				Kegiatan Pelayanan Kelahiran dan	dokumen	yang diterbitkan		427.259.324
				Kelahirah dan Kematian	pencatatan	dibagi jumlah		
				Kemadan	sipil	kelahiran yang		F4 204 4FC
				2. Kegiatan Pelayanan		terjadi) x 100% + (jumlah kutipan		54.381.456
				Perkawinan,		akta kematian		
				Perceraian, Perubahan Status		yang diterbitkan		
				Anak dan		dibagi jumlah		
				Pewarganegaraan		kematian yang		
						terjadi) x 100%		
						dibagi 2 indikator		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Program PengelolaanInformasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data 1. Kerjasama dan Inovasi Pelayanan 2. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pemanfaata n data kependuduk an	(Jumlah OPD yang menandatangani PKS pemanfaatan data kependudukan dibagi jumlah OPD dilingkungan Pemkot Yogyakrta) x 100%	60%	1.769.212.350 129.134.838 1.640.077.512

Sumber: Review RENSTRA Dindukcapil, 2018

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja secara transparan yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang dijanjikan pada tahun 2018. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok pengukuran yang telah tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah.

3.1 CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 telah tercapai. Dari 5 indikator dari 1 sasaran, 5 indikator dinyatakan "berhasil" yaitu dengan tingkat capaian ≥ 90% terhadap target yang telah ditetapkan, sedangkan 1 indikator (Pemanfaatan data kependudukan) dinyatakan tidak berhasil karena tingkat ketercapaiannya hanya 87,72%.

Berikut merupakan rekapitulasi realisasi pencapaian organisasi dari tahun 2014 sampai tahun 2017 dan capaian tahun 2018

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2014 - 2018

	Nama	D	D. uleite		Capai	ian Tahı	ın (%)
No	Indikator dan Target 2018	Rumus Pengukuran	Perhitungan tahun 2018	2017	2016	2015	2014
1	Persentase penduduk ber KTP 99,75 %	= Jumlah Penduduk yang memiliki KTP JumlahWajib KTP	308.569 x 100% 313.317 = 98,48	97,49	100	98,68	98
2	Persentase penduduk memiliki Kartu Keluarga 100%	$= \frac{\text{Jumlah KK yang dimiliki/diterbitkan}}{\text{Jumlah KK}} x \ 100\%$	135.602 x 100% 135.602 = 100	100	96,11	100	100
3	Persentase penduduk memiliki dokumen kutipan akta kelahiran 95%	Σ Kutipan Kelahiran yang diterbitkan $\left(\frac{U_{mum}}{Tdk}\right)_{x 100\%}$ = Jumlah Kelahiran Terjadi	3.996 x 100% 4.613 = 86,62	91,4 5	94	94,1	93,2

4	Persentase penduduk meninggal memiliki kutipan akta kematian 92,5%	$= \frac{\Sigma \text{Kutipan Kematian yang diterbitkan (Umum)}}{\text{Jumlah Kematian Terjadi}} x 100\%$	2.350 x 100% 2.808 = 83,69	85,1 2	92	85,5	83,7
5	Persentase pemanfaatan data kependudukan 60%	= Jumlah OPD yg Menandatangani PKS Jumlah OPD di lingkungan pemkot	50 x 100 % 95 = 52,63	100			

Tabel 3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2018

No	Nama Indikator dan Target 2018	Perhitungan Tahun 2018	Realisasi Capaian Tahun 2018 (%)	Tingkat Capaian Tahun 2018 (%)
1	Persentase penduduk ber KTP 99,75%	308.569 x 100% 313.317	98,48	99,49
2	Persentase penduduk memiliki Kartu Keluarga 100%	135.602x 100% 135.602	100	100,00
3	Persentase penduduk memiliki dokumen kutipan akta kelahiran 95%	3.996 x 100% 4.613	86,62	91,18
4	Persentase penduduk meninggal memiliki kutipan akta kematian 92,5%	2.350 x 100% 2.808	83,69	90,48
5	Persentase pemanfaatan data kependudukan 60%	50 x 100 % 95	52,63	87,72

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi target kinerja kepemilikan KTP el pada tahun 2018 tercatat sebesar 98,48% yang berarti dari seluruh penduduk wajib KTP El sebanyak 98,48 % telah memiliki KTP El. Dilihat dari target kinerja tahun 2018 yang sebesar 99,75% maka tingkat capaian realisasi kepemilikan KTP el tersebut sebesar 99,49%. Meskipun belum tercapai 100% capaian ini termasuk dalam kriteria capaian **amat baik.**

Untuk Penerbitan Kartu Keluarga pada tahun 2018 ditargetkan 100% artinya bahwa seluruh penduduk Kota Yogyakarta memiliki dokumen Kartu Keluarga. Pada akhir tahun 2018 tercatat terealisasi sebasar 100% yang berarti seluruh keluarga di Kota Yogyakarta telah memiliki dokumen kartu keluarga. Sehingga perolehan persentase 100% termasuk dalam kategori **amat baik.**

Realisasi target kinerja kepemilikan akta pada tahun 2018 tercatat sebesar 86,62% yang berarti dari anak yang lahir pada tahun 2018 sebanyak 86,62 % telah memiliki akta kelahiran. Dilihat dari target kinerja tahun 2018 yang sebesar 95% maka tingkat capaian realisasi kepemilikan akta kelahiran tersebut sebesar 91,18%. Meskipun belum tercapai 100% capaian ini termasuk dalam kriteria capaian **amat baik.**

Penerbitan akta kematian tahun 2018 tercatat sebesar 83,69% yang berarti dari dari kejadian kematian pada tahun 2018 sebanyak 86,62 % telah diterbitkan akta kematiannya. Dilihat dari target kinerja tahun 2018 yang sebesar 92,5% maka tingkat capaian realisasi kepemilikan akta kematian tersebut sebesar 90,48%. Meskipun belum tercapai 100% capaian ini termasuk dalam kriteria capaian **amat baik.**

Adapun realisasi pemanfataan data kependudukan tahun 2018 tercatat sebesar 52,63% yang berarti telah dilaksanakan pemanfaatan data kependudukan pada tahun 2018 sebanyak 52,63 % dari seluruh OPD dan Unit Kerja. Dilihat dari target kinerja tahun 2018 yang sebesar 60% maka tingkat capaian realisasi pemanfataan data kependudukan tersebut sebesar 87,72%. Yang berarti termasuk dalam kriteria capaian **baik.**

3.2 CAPAIAN KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR SASARAN

Untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya tertib administrasi kependudukan masyarakat yang semakin meningkat diukur dari indikator utama yaitu kepemilikan dokumen kependudukan yang terdiri kepemilikan KK dan KTP El dan penerbitan dokumen pencatatn sipil yang terdiri penerbitan akta kelahiran dan kematian.

Pencapaian indikator kinerja utama kepemilikan KK dan KTP El menghasilkan pengukuran indikator kinerja program persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang dapat dilihat pada table berikut.

<u> </u>					
Indikator Program	Ca	Capaian 2018			Capaian s/d th.
	Target	Target Realisasi %			2018 terhadap
	% %		(2018)	target Jangka	
			%	Menengah 2018	
					(%)
Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	99,75	99,24	99,74	99,50	99,74

Tabel 3.2 Capaian Indikator Program Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Target capaian kinerja Program Pelayanan pendaftaran penduduk dengan indikator Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan pada tahun 2018 adalah sebesar 97,49% terealisasi sebesar 99,24% yang berarti target kinerja program tercapai 99,74% capaian ini termasuk dalam kriteria capaian **amat baik.**

Adapun capaian indikator utama penerbitan akta kelahiran dan akta kematian menghasilkan pengukuran indikator kinerja program ke dua yaitu Persentase penerbitan dokumen pencatatn sipil yang dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3.3 Capaian Indikator Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil

Indikator Program	Ca	paian 2018		Target Jangka	Capaian s/d th.	
	Target Realisasi %		Menengah	2018 terhadap		
	% %		(2018)	target Jangka		
				%	Menengah 2018	
					(%)	
Persentase penerbitan dokumen pencatatn sipil	93,73	85,16	90,83	93,73	90,83	

Target capaian kinerja Program Pelayanan Pencatatan Sipil dengan indikator Persentase penerbitan dokumen pencatatn sipil pada tahun 2018 adalah sebesar 97,49% terealisasi sebesar 85,16% yang berarti target kinerja program tercapai 90,83% capaian ini termasuk dalam kriteria capaian **amat baik**

Berdasarkan pencapaian kinerja program maka dapat diketahui pencapaian sasaran yang direncanakan. Dari table berikut diketahui bahwa tingkat capaian indikator sasaran sebesar 98,49% yang berarti bahwa sasaran tertib administrasi kependudukan masyarakat Kota Yogyakarta yang diharapkan meningkat berhasil dicapai dengan kriteria capaian **amat baik**

Tabel 3.4 Capaian Indikator Sasaran

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA INDIKATOR SASARAN	Target	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Indeks tertib administrasi kependudukan	50% penerbitan dokumen kependudukan + 50% penerbitan dokumen pencatatan sipil	96,75%	(50% x 99,74) + (50% x 90,83) = 95,29 %	98,49 %

3.3. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Sasaran yang hendak dicapai Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta adalah :



Sasaran terwujudnya tertib administrasi kependudukan yang meningkat yang diukur melalui indek tertib administrasi kependudukan telah tercapai dengan tingkat capaian sebagai amat baik.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks tertib administrasi kependudukan	96,75%	95,29 %	98,49 %

Perwujudan upaya menuju tertib administrasi kependudukan di dasari oleh semangat Nawa Cita Pertama yaitu memberikan perlindungan hukum kepada seluruh WNI Penduduk Indonesia dengan memberikan Dokumen Kependudukan secara cepat, akurat dan lengkap. Perwujudan dari kehadiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerapkan pola-pola pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat antara lain :

- 1. Menerapkan pola pendekatan pelayanan
- 2. Menerapkan pola pelayanan paket/terpadu
- 3. Menerapkan pola pelayanan berbasis teknologi informasi dan internet

Pola Pendekatan pelayanan yang dilakukan antara lain:

- a. Adanya pendekatan pelayanan di tingkat kecamatan untuk penerbitan seluruh dokumen pendaftaran penduduk yaitu Kartu Keluarga, KTP El, KIA dan Pindah Penduduk, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengurusnya.
- b. Pada hari-hari tertentu dilakukan kegiatan pelayanan jemput bola pelayanan Kartu Penduduk dan KTP El. Jemput bola dilaksanakan di Kelurahan, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Panti, Pondok pesantren, Tempat Publik seperti Pasar Tradisional dan Saint Centre "Taman Pintar".



Gambar 3.1 Kegiatan Jemput Bola

Selain itu dilaksamakan pula kegiatan membuka layanan rekam dan cetak KTP El pada hari libur dan kegiatan jemput bola secara serentak tingkat Nasional



Gambar 3.2 Pengumuman pelayanan Publik

c. Pendekatan pelayanan rekam KTP Elektronik melaui pelayanan E-mobile bagi penduduk yang mengalami keterbatasan fisik dan mental seperti lanjut usia, sakit, difabel dan sakit jiwa.







Gambar 3.3 Perekaman KTP El Bagi Penduduk yang Mengalami Keterbatasan Fisik

Pola Pelayanan Paket/Terpadu dilaksanakan melalui paket pelayanan 3 in 1 yaitu pelayanan pengurusan akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA) sekaligus.

Paket pelayanan ini dilaksanakan dilaksanakan di Rumah Sakit Mitra dan Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Gambar 3.4 Proses Layanan 3 in 1 di Rumah sakit Mitra

Terdapat 11 (sebelas) RS Mitra yang telah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pembuatan paket dokumen 3 in 1 yaitu pelayanan pengurusan akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA) sekaligus. Dokumen tersebut akan diserahkan di Rumah Sakit setelah ibu selesai melahirkan, dengan demikian masyarakat menjadi lebih mudah dalam mengurus dokumen kependudukan anggota keluarga yang baru dilahirkan.

- 1. RS JOGJA
- 2. RS PRATAMA
- 3. RS BETHESDA LEMPUYANGWANGI
- 4. RS PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
- 5. RS BHAKTI IBU GOLO
- 6. RS PERMATA BUNDA KOTAGEDE
- 7. RS HIDAYATULLAH
- 8. KLINIK PRATAMA PURI ADISTY
- 9. PUSKESMAS JETIS
- 10. PUSKESMAS TEGALREJO
- 11. RS. SOETARTO



Gambar 3.5 Proses Layanan 3 in 1 di Dinas

Untuk mendorong percepatan kepemilikan akta kelahiran masyarakat maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga mendorong kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) karena untuk mendapatkan KIA maka harus sudah memiliki akta kelahiran.

Jemput bola KIA dilaksanakan di 45 Kelurahan dan Sekolah-Sekolah baik di tingkat SD maupun SMP.

Sejak tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Penacatatan Sipil Kota Yogyakarta menjadi salah satu dari 58 OPD yang diijinkan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendari untuk mencetak KIA Nasional.



Gambar 3.6 Kegiatan Jemput Bola KIA berdampak pada meningkatnya pembuatan Akta Kelahiran

Pola pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi dan internet juga dilaksanakan untuk memberikan kemudahan dan kecepatan bagi masyarakat. Pelayanan dalam jaringan (daring) yang dilaksanakan antara lain:

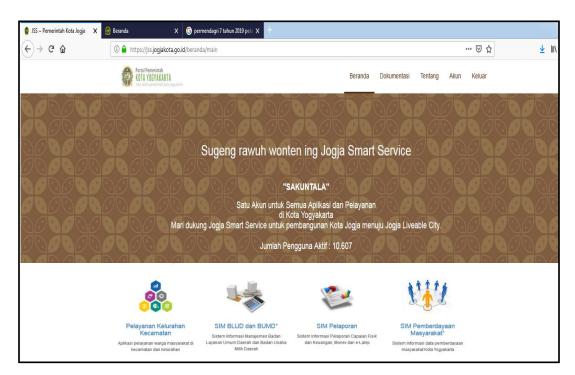
1. Pelayanan On Line Adminduk



Gambar 3.7 Layanan On Line Adminduk

Kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui layanan on line ini masyarakat dapat mengajukan permohonan melalui aplikasi berbasis web dan mengirimkan semua berkas permohonan secara digital. Pada saat dokumen telah selesai dicetak maka masyakat akan mendapatkan notifikasi bahwa dokumen telah daoat diambil.

Pelayanan Kelurahan dan Kecamatan Melalui Jogja Smart Service (JSS)
Masyarakat yang akan menggunakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan di tingkat kelurahan dan kecamatan dapat mengakses melalui aplikasi Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Jogja Smart Service (JSS) pada menu Pelayanan Kelurahan dan Kecamatan yang dapat diakses melalui smart phone.



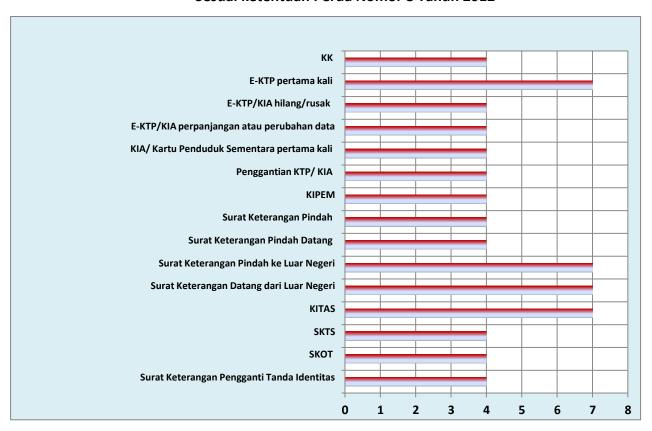


Gambar 3.8 Layanan Administrasi Kependudukan di Jogja Smart Service

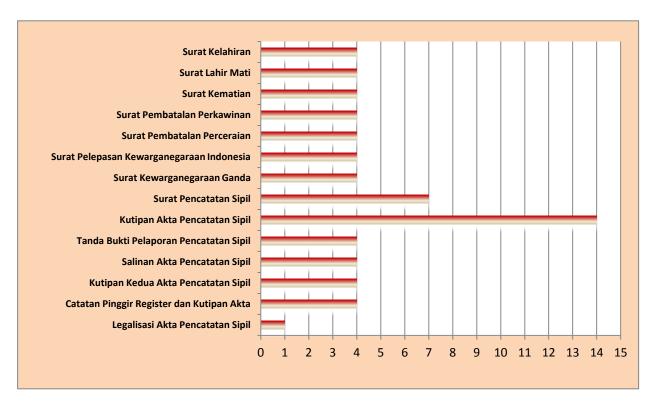
Pencapaian capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga dipengaruhi oleh upaya peningkatan kualitas pelayanan, terutama pada percepatan layanan. Waktu yang dibutuhkan untuk proses dokumen kependudukan khususnya penggantian KTP Elektonik, perpanjangan dan KTP Elektonik baru, hanya membutuhkan waktu 1 (satu) hari. Berkaitan proses pembuatan KK dan KTP Elektronik akibat kedatangan dari luar kabupaten/ kota atau propinsi membutuhkan waktu 1(satu) sampai dengan 3 (hari) hari. Proses pembuatan akta catatan sipil hanya membutuhkan waktu 1-3 hari.

Sedangkan batas waktu penyelesaian permohonan dokumen sesuai ketentuan Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut :

Batas Waktu Pelayanan Dokumen Kependudukan (hari/kerja) Sesuai ketentuan Perda Nomor 8 Tahun 2012



Batas Waktu Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil (hari/kerja) Sesuai ketentuan Perda Nomor 8 Tahun 2012



Grafik 3.1 Batas Waktu Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selain itu dalam rangka meningkatkan kualitas data layanan sehingga pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil berjalan dengan lancer karena di dukung database yang berkualitas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerjasama dengan Pengadilan Negeri dan

Kementerian Agama untuk perubahan biodata penduduk akibat perkawinan dan putusan pengadilan lainnya yang bersampak pada perubahan biodata penduduk.

Kegiatan Sosialisasi kepada masyarakat juga dilaksanakan untuk meningkatan pemahaman masyarakat akan prosedur, mekanisme dan manfaat kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Materi Sosialisasi mencakup:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat kepemilikan Kartu Keluarga, KTP El, akte kelahiran, dan akta kematian.
- Sosialisasi Peraturan perundangan terbaru diantaranya berlakunya Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) atas Kebenaran Kelahiran dan atau Kebenaran Perkawinan Orang Tua. SPTJM ini sangat membantu masyarakat yang tidak memiliki dokumen kelahiran dan perkawinan orang tua untuk tetap dapat memiliki akta kelahiran.
- Sosialisasi Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XI/2013 yang membatalkan ketentuan tentang perlunya ketetapan pengadilan untuk pengurusan akte kelahiran yang terlambat lebih dari 1 (sat) tahun. Ketentuan ini sangat memudahkan bagi masyarakat untuk meiliki akta kelahiran.
- Meningkatkan pemahaman masyarakat atas persayaratan dan mekanisme pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil



Gambar 3.9 Sosialisasi di Media Elektronik

Dalam upaya meningkatkan kemampuan petugas dalam pelayanan prima dilaksanakan Bintek Service Excellen



Gambar 3.10 Kegiatan Bintek Service Excellen

Melengkapi sarana prasarana pelayanan sesuai standar yang ditetapkan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan mengedepankan transparansi informasi melalui penanganan keluhan dan aduan yang baik serta keterbukaan informasi melalui web site.

Selain itu peralatan pendukung Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan sarana prasarana Pencetakan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti Hardware dan software selalu menjadi pemantauan agar kondisinya selalu terpelihara sehingga capaian pencapaian kinerja tidak mengalami kendala yang bersifat teknis.

Dari upaya ini Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil mendapat penghargaan di Tingkat Provinsi dan Nasional antara lain :

- **ROLE MODEL** Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Kementerian PAN dan RB tingkat Nasional Tahun 2018. Penghargaan ini telah diterima selama 3 (tiga) tahun berturut turut sejak tahun 2016.
- Penghargaan dari Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal Keterbukaan
 Informasi Publik Tahun 2018

Dalam realisasi kinerja Pemanfaatan Data Kependudukan tercatat tingkat capaiannya sebesar 87,72 dari target 95 OPD/Unit Kerja sebanyak 50 OPD telah melaksanakan perjanjian kerjasama untuk pemanfataan data kependudukan.



Gambar 3.11 Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

3.4. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dihadapi beberapa kondisi umum saat ini ,seperti berikut merupakan daftar permasalahan dan upaya pemecahannya.

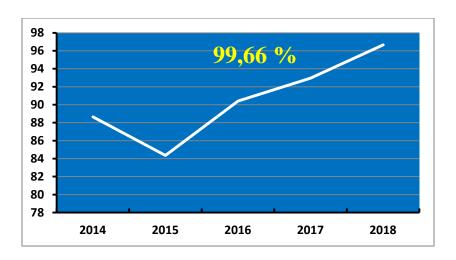
Tabel 3.5 Permasalah dan Upaya Pemecahan Masalah

No	PROGRAM / KEGIATAN	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH		
1	Program Pelayanan Pe	endaftaran Penduduk			
1.1.	Pelayanan Identitas Penduduk	- belum optimalnya partisipasi melaksanakan kewajibannya melaporkan setiap peristiwa kependudukan yang terjadi. Hal ini disebabkan al yang bersangkutan tinggal di luar kota Yogyakarta, tidak memiliki kelengkapan dokumen pendukung	 Disediakannya fasilitas layanan on line sehingga bias diakses dari mana saja Dilaksanakannya sosialisasi tentang perubaha-perubahan kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan penerbitan dokumen Memperbanyak Jumlah Rumah Sakit yang Bekerjasama layanan 3 in Mempersiapkan pencetakan Akta Kelahirannya sendiri di rumah Pengantaran dokumen administrasi kependudukan diantar sampai ke rumah pemohon 		
2.	Program Pelayanan Pe	encatatan Sipil			
2.1	Pelayanan Kelahiran dan Kematian	 a. Tidak seimbangnya beban kerja dengan SDM yang tersedia baik pada bulan normal, apalagi pada bulan dilaksanakannya pelayanan jemput boladan ajaran baru sekolah b. Sarana dan prasarana kearsipan kurang memadai 	 Merekrut tenaga teknis Mengusulkan agar kontrak tenaga teknis bisa 12 bulan agar pelayanan tetap berjalan seperti biasa, Mengusulkan penambahan SDM Membangun ruang arsip register akta capil dan arsip kependudukan yang lebih luas yang dilengkapi dengan peralatan arsip yang standar Digitalisasi arsip 		
2.2.	Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	Kurang terup datenya data penduduk terkait status perkawinan dan perceraian dalam database SIAK	- Dilaksanakannya kerjasama dengan Kementerian Agama untuk integrasi data perkawinan sehingga perubahan status perkawinan dalam database kependudukan dapat terjadi secara otomatis.		
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data				
3.1	Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	- Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan bagi lembaga/instansi pengguna di Lingk. Pemkot Yogykarta	 Dilaksanakannya kerjasama pemanfaatan data dengan 50 OPD dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Sosialisasi kebijakan Administrasi Kependudukan terutama terkait dengan pemanfaatan data Dilaksanakannya perjanjian kerjasama Pembuatan data warehouse 		

		- Belum optimalnya pemanfaatan inovasi yang telah dibuat	kependudukan untuk dapat dimanfaatkan oleh instansi terkait - Sosialisasi melalui Pembuatan media sosialisasi menggunakan visualisasi/film
3.2	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	- Belum optimalnya penyajian data dan informasikependudukan	 Pembuatan Profil Kependudukan Pengembangan Modul Informasi Statistik Kependudukan Pengembangan software sistem antrian layanan administrasi kependudukan Pengembangan penambahan informasi di web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Pengadaan tenaga teknis pengelola informasi administrasi kependudukan Verifikasi data penduduk untuk keperluan Lembaga Pengguna Pengadaan alat baca KTP-EI

3.5. Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil tahun 2018 adalah sebesar Rp. 3.996.592.050,00 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp. 3.863.183.751,00 atau sebesar 99,66% (rincian terlampir). Dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya, persentase realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil pada tahun 2018 mengalami peningkatan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut.



Grafik 3.2. Perkembangan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Th 2014 – 2018

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2014 - 2018

No	Program / Kegiatan	Capaian Kinerja Anggaran (%)					
		2018	2017	2016	2015	2014	
1.1.	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	92,04	94,1	100	100	99,98	
1.2.	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	80,88	98,75	100	80,17	59,99	
1.3.	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional.	100	52,62	67,49	87	76,99	
1.4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	0	100	98,34	88,20	85,08	
1.5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	99,64	100	69,25	99,15	100,00	
1.6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	95,76	87,85	42,20	90,96	98,08	
1.7.	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	99,94	99,99	100	99,81	100	
1.8.	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	91,04	93,84	70,66	71,93	72,33	
1.9.	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	100	99,98	97,06	100	97,56	
1.10.	Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	92,04	98,90	98,15	96,83	77,41	
1.11.	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	99,80	99,93	99,64	100	97,36	
1.12.	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan	99,80	95,00	89,78	93,55	93,15	
1.13.	Kegiatan Penyediaan Makanan Minuman	93,74	91,96	77,00	66,05	95,37	
1.14.	Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	98,28	87,66	71,46	89,09	90,10	
1.15	Kegiatan Penyediaan jasa Tenaga Bantuan	100	99,75	100	100	100	
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	83,05	72,72	84,27	85,95	62,18	
2.1.	Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Kantor/Tempat	76,74	96,43	98,74	98,85	90,26	

2.2.	Kegiatan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	83,27	38,72	49,56	55,39	44,19
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	100	78,71	-	-
3.1	Bimtek Implementasi Peraturan	100	100	78,71-	-	-
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	91,92	90,87	98,27	68,15	80,74
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kierja SKPD.	91,92	90,87	98,27	68,15	80,74
5	Program Pelayanan Dokumen dan Surat-surat Kependudukan			94,94	97,53	54,27
5.1	Pembuatan KTP El/KIA dan KK Di Kota Yogyakarta			93,77	96,62	42,43
5.2	Peningkatan Administrasi Kependudukan			95,61	97,90	70,80
	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	95,58	96,17			
	Pelayanan Identitas Penduduk	94,11	95,15			
	Pelayanan Pindah dating dan Pendataan Penduduk	98,30	97,35			
6	Program Pelayanan Permohonan dokumen Pencatatan Sipil		96.41	94,78	88,59	94,15
6.1	Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil		97.68	96,42	87,81	92,59
6.2	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil		95.4	92,83	89,40	95,76
	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	98,05	96.41			
	Pelayanan Kelahirann dan Kematian	97,80	97.68			
	Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Dan Pewarganegaraan	100	95.4			
7	Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan			90,25	73,26	68,15

7.1	Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan			91,12	65,25	68,87
7.2	Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan			87,98	91,41	56,39
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	97,80	92.31			
	Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	96,72	89.6			
	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	97,88	95.77			
	JUMLAH TOTAL	96,66	92.95	90,41	84,35	88,64

Penyerapan anggaran tahun 2018 digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Jika dilihat dari realisasi anggaran penyerapan anggaran dalam mendukung capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan penyerapan anggaran yang sangat tinggi, ini terlihat dari realisasi atau capaian masing-masing program, yaitu:

- 1. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk realisasi anggarannya sebesar Rp 675.684.622,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 706.912.648,00 atau sebesar 95,58%.
- 2. Program Pelayanan Pencatatan Sipil realisasi anggarannya sebesar Rp 472.247.254,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 481.640.780 atau sebesar 98,05%.
- 3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaartan Data realisasi anggarannya sebesar Rp 1.730.249.614,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 1.769.212.350,00 atau sebesar 97.80 %.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikanpada tabel berikut:

Kinerja Program	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	%	
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	99,74	95,58	95,83	
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	90,83	98,05	107,95	
Program Pengelolaan Informasi Administrasi	87,72	97,80	111,49	
	97,14	92,76	105,09	

Tabel 3.7 Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran

Dibandingkan dengan kinerja yang dicapai di tahun 2018 maka realisasi anggaran sebesar 92,76% dibandingkan dengan realisasi kinerja sebesar 97,14% menunjukkan adanya efektifitas penggunaan dana atau anggaran. Sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisiens menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi atau sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Pencapaian target kinerja didukung oleh pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk tahun 2018. Program dan kegiatan tahun 2018 mengacu pada program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Dari kegiatan yang ada tersebut, kegiatan yang satu dengan yang lainnya adanya saling keterkaitan dan saling mendukung untuk mencapai sasaran/ target Perangkat Daerah yang direncanakan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja seperti tersebut diatas dapat disampaikan Hasil Analisis Akuntabilitas serta dukungan kegiatan pada masing-masing sasaran sbb:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini memuat aspek kepegawaian, umum, dan aspek keuangan, yang didukung 3 (tiga) kegiatan berfungsi memfasilitasi kegiatan operasional dan mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan nilai capaian 97,09% dapat diartikan bahwa Program yang dijabarkan dalam Pelayanan Administrasi Perkantoran telah mendukung kegiatan operasional Perangkat Daerah. Artinya pencapaian target memperoleh nilai *amat baik*.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ini mencakup kegiatan untuk mendukung aparatur pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dengan 2 (dua) kegiatan yang menyangkut pemeliharaan gedung kantor dan pemeliharaan kendaraan/ operasional. Pada tahun 2018 adanya pembuatan sekat ruang penyimpanan arsip pendaftaran penduduk yang bertujuan untuk penampungan berkas arsip adminduk yang akan disusutkan dan melengkapi sarana prasarana dalam rangka pelayanan prima pada masyarakat. Hasil pelaksanaan Program ini meraih persentase pencapaian 83,05% artinya mendapat nilai predikat *baik*.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini mengakomodir pembimbingan teknis bagipegawai dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, menciptakan kepercayaan dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan agar lebih tertib adminduk. Hasil pelaksanaan Program ini dengan persentase pencapaian 100% artinya mendapat nilai *amat baik*.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program ini mengakomodir administrasi dan evaluasi program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan melaporkan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang berwenang. Hasil pelaksanaan Program ini dengan persentase pencapaian 91,92% artinya mendapat nilai **amat baik**.

5. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Program ini mengakomudir semua kegiatan terkait pelayanan publik dalam pengurusan dokumen kependudukan, penyediaan sarana pelayanan seperti blangko dan formulir palayanan, kegiatan pendataan untuk penduduk rentan agar dapat diterbitkan dokumen kependudukan serta kegiatan sosialisasi pada masyarakat dan pembinaan bagi aparat di tingkat kecamatan. Hasil pelaksanaan Program ini meraih persentase pencapaian 95,58%, dengan penilaian **amat baik.**

6. Program Pelayanan Pencatatan Sipil

Program ini mengakomudir semua kegiatan terkait pelayanan publik dalam pengurusan dokumen pencatatan sipil, penyediaan sarana pelayanan seperti blangko dan formulir palayanan, kegiatan forum komunikasi, kegiatan pengelolaan arsip dengan digitalisasi dan kegiatan sosialisasi. Hasil pelaksanaan Program ini meraih persentase pencapaian 98,05 %, dengan penilaian **amat baik**

7. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Program ini mengakomodir semua kegiatan pendukung pelayanan yaitu Aplikasi Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) serta kesiapan perangkat keras pendukung SIAK baik di dinas maupun di 14 kecamatan. Selain itu program ini juga mengakomodir kegiatan *up date* data kependudukan yang melibatkan seluruh RT se-Kota Yogyakarta, dan penyajian hasil pengolahan data kependudukan berupa Profil Perkembangan Kependudukan dan pengelolaan website kependudukan. Hasil pelaksanaan Program ini meraih persentase pencapaian 97,80 %, dengan penilaian **amat baik**

Untuk capaian program dan kegiatan tahun 2018 disajikan dalam table berikut : Tabel 3.8 Persentase Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2018

No	Program/Kegiatan	Capaian
		tahun 2018
		(%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	97,09
1.1	Kegiatan Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi	97,19
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96,04
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	100
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	83,05
2.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung/Bangunan Kantor	76,74
2.2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	83,27
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur	100
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	100
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	91,92
	Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
4.1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan capaian Kinerja SKPD	91,92

5	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	95,58			
5.1	Kegiatan Pelayanan Identitas Penduduk	94,11			
5.2	Kegiatan Pelayanan Pindah Datang dan	98,30			
	Pendataan Penduduk				
6	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	98,05			
6.1	Kegiatan Pelayanan Kelahiran dan Kematiian	97,80			
6.2	Kegiatan Pelayanan Perkawinan, Perceraian,	100			
	Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan				
7	Program Pengelolaan Informasi Administrasi	97,80			
	Kependudukan dan Pemanfaatan Data				
7.1	Kegiatan Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	96,72			
7.2	Kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi	97,88			
	Kependudukan				

Dukungan program kegiatan-kegiatan perbidang secara spesifik untuk mendorong penyelenggaraan administrasi kependudukan yang baik dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Proses Penerbitan dokumen kependudukan seperti KK, KTP Elektronik, KIA, surat pindah penduduk dan dokumen dan surat-surat kependudukan lainnya yang menjadi kewenangan bidang pelayanan pendaftaran penduduk. Beberapa jenis pelayanan dilaksanakan di tingkat kecamatan seperti penerbitan KK, KIA dan rekam KTP Elektronik. Hal ini dilakukan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan. Masingmasing jenis pelayanan telah dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standart Pelayanan Minimalnya (SPM).

b. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Proses penerbitan dokumen pencatatan sipil seperti penerbitan akte Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Perubahan Nama menjadi kewenangan bidang pencatatan sipil. Prioritas Utama pada Pelayanan Pencatatan Sipil adalah penerbitan akte kelahiran bagi anak usia 0-18 th dan akta kematian. sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal pelaksanaan pelayanan publik penerbitan dokumen pencatatan sipil telah dibuat Standart Pelayanan Minimal dimana target nasional untuk akte kelahiran sebesar 90% pada tahun 2020 dan akte kematian 70 % pada tahun 2020. Selain itu telah diterbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil, sehingga diharapkan pelayanan pencatatan sipil bisa berjalan cepat, dengan keakuratan data yang tinggi dengan pelayanan yang efektif dan efisien.

c. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data telah digunakan Aplikasi perangkat lunak Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK). Dengan aplikasi SIAK maka server database kependudukan terkoneksi secara *on line dengan* server pusat yaitu di data *centre* Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri. Selain itu server dinas juga terkoneksi dengan database tingkat provinsi dan tingkat Kecamatan untuk kepentingan pelayanan. Dengan server yang selalu terkoneksi dengan pusat memungkinkan dihindari adanya data ganda. Dengan data yang akurat dan dapat dipastikan

ketunggalannya maka dapat dihindari terciptanya ketidakpastian hukum, kejahatan, terorisme dan sebagainya.

Selain itu melalui bidang Pengelolaaan Informasi Administrasi Kepndudukan dan Pemanfaatan Data telah membangun berbagai jenis aplikasi pendukung SIAK dan aplikasi pendukung pelayanan sebagai bagaian dari inovasi antara lain sistem aplikasi layanan on line untuk akta kelahiran dan dokumen pencatatan sipil lainnya. Aplikasi ini dapat dimanfaatkan masyarakat sehingga mampu meningkatkan kemudahan dan kecepatan akses layanan. Sedangkan aplikasi pendukung SIAK telah dibangun <u>Tool</u> Kependudukan.

Selain itu Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai kewenangan untuk mengelola pemanfaatan data kependudukan berupa penyajian data kependudukan dalam bentuk agregat serta melaksanakan kerjasama dengan berbagai lembaga pengguna data atau integrasi data terkait.

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya lebih banyak diukur dengan parameter efektifitas dan efesiensi.

Tabel 3.9 Efektivitas Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2018

		Haail	Capaian/ Tahun 2018		
No	Program / Kegiatan	Hasil Pengukur an	Efektive	Efisien	Alasan Efektive/ Efisien Terhadap Program Kegiatan dengan Realisasi < 90%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	97,09	V	V	
1.1.	Kegiatan Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi	97,19	V	V	
1.2.	Kegiatan Penyediaan Jasa. Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96,04	V	V	
1.3.	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	100	V	V	
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	83,05	V	V	Menyesuaikan kebutuhan
2.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan/Kantor	76,74	V	V	
2.2	Kegiatan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/o Operasional	83,27	V	V	Pemeliharaan kendaraan menyesuaikan ada tidaknya kerusakan
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur	100	V	V	
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	100	V	V	
4	Program Peningkatan Pengem bangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	91,92	V	V	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengemndalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	91,92	V	V	
5	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	95,58	V	V	
5.1	Pelayanan Identitas Penduduk	94,11	V	V	
5.2	Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	98,30	V	V	
6	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	98,05	V	V	

6.1	Pelayanan Kelahiran dan Kematian	97,80	V	V	
6.2	Pelayanan Perkawinan,	100	V	V	
	Perceraian, Perubahan Status				
	Anak dan Pewarganegaraan				
7	Program Pengelolaan Informasi	97,80	V	V	
	Administrasi Kependudukan dan				
	Pemanfaatan Data				
7.1	Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	96,72	V	V	
7.2	Pengelolaan Informasi	97,88	V	V	
	Administrasi Kependudukan				
	Total	96,66			

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Program/ Kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tahun 2018 menunjukkan *Efektive dan efisien.*

BAB 4 PENUTUP

LKIP merupakan laporan yang menggambarkan pelaksanaan manajemenpembangunan berbasis kinerja pada suatu organisasi serta menggambarkan upaya-upaya perbaikan pelayanan publik. Setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi denganmenggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKIP menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tahun 2018 menyajikan pencapaian dari sasaran strategis yang tercermin pada capaian indikator kinerja dari yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2018. Secara umum, sasaran strategis yang ditetapkan telah berhasil dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Hal ini terlihat dari 5 indikator Kinerja yang diperjanjikan, 4 indikator kinerja sesuai dengan target dengan criteria capaian sangat baik sedangkan satu indikator dinyatakan memenuhi target yang diperjanjikan dengan kriteria capaian baik. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tahun 2018 adalah amat baik. Perencanaan dan Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien tercermin dari hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan Belanja Langsung yang pada tahun 2018 anggaran terserap 96,66 % lebih tinggi dari tahun 2017 anggaran terserap 92,95%%.

Selain keberhasilan yang telah dicapai, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga terdapat permasalahan ataupun hambatan yang dihadapai. Permasalahan tersebut diantaranya menyangkut banyaknya tuntutan hukum di pengadilan berkaitan dengan penyalahgunaan atau pemalsuan produk yang dihasilkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, munculnya permasalahan publik yang melibatkan beberapa instansi, dan keterbatasan sumber daya manusia.

Meskipun demikian karena adanya komitmen bersama untuk melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja dan penerapan konsep *e-government* serta e-*performance based budgeting* maka target kinerja dapat dicapai dan permasalahan dapat diatasi dengan baik. terbangun dengan baik. Sekretariat merupakan unsur pendukung (supporting) dalam sebuah organisasi namun memiliki peran yang strategis dan mendalam dalam pengelolaan/manajemen unit kerja khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tidak hanya berperan dalam pembinaan dan pemberian dukungan administrasi. Melainkan, juga sebagai perekat, penopang, dan penunjang dalam organisasi dinas dimana unsur-unsur perencanaan, evaluasi dan monitoring, serta pelayanan terhadap stakeholders internal, berawal dari unit-unit dalam kesekretariatan. Mengingat hal tersebut, maka fungsi dan peran Sekretariat secara otomatis merupakan faktor mendorong terwujudnya kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

Di masa depan beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta ke depan karena walaupun beberapa target kinerja telah tercapai sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan masih adanya masyarakat yang belum tertib dalam pelaporan kependudukan.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan demikian LKIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.